

BAB II

TIBET SEBAGAI WILAYAH OTONOMI RRC

Tibet, atau dikenal sebagai Dataran tinggi Qinghai-Tibet (Qingzang) adalah dataran tinggi yang luas di Asia Timur yang meliputi sebagian besar Daerah Otonomi Tibet dan Provinsi Qinghai di Republik Rakyat Cina, serta Provinsi Ladakh di Kashmir. Dataran tinggi ini luasnya 2,5 juta kilometer persegi (1.000 kali 2.500 kilometer), dengan ketinggian rata-rata 4.500 di atas permukaan laut. Sebagai dataran tinggi terbesar yang letaknya tertinggi di dunia, kawasan dataran tinggi Tibet mendapat julukan sebagai "atap dunia".

Wilayah Tibet dikelilingi barisan pegunungan yang sangat tinggi. Di bagian barat laut terdapat Pegunungan Kunlun yang memisahkan dataran tinggi Tibet dengan Cekungan Tarim, sedangkan di bagian timur laut terdapat Pegunungan Qilian yang memisahkan dengan Gurun Gobi. Di bagian selatan terdapat Sungai Yarlung Tsangpo.

Di bagian Timur dan Tenggara dataran tinggi Tibet terdapat daerah perbukitan yang merupakan hulu bagi Sungai Salween, Sungai Mekong, dan Sungai Panjang di selatan Provinsi Sichuan. Di sebelah barat, dataran tinggi Tibet berbatasan dengan barisan Pegunungan Karakoram di utara Kashmir.

A. Masyarakat Dan Budaya Tibet

1. Masyarakat dan Budaya Tibet sebelum Masuknya Cina

Setiap orang yang mengetahui budaya Tibet dan memiliki pengalaman berkunjung pasti dapat mengetahui kenyataan dari budaya Tibet. Tetapi untuk membuktikan hal ini kita harus berpikir kembali ke tanah asal para leluhurnya. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional Tibet, adalah sebuah bangsa yang lebih dari satu negara, lebih dari satu suku, lebih dari satu marga dan lebih dari satu keluarga. Satu-satunya unit politik yang digunakan untuk menjadi bangsa. Orang Tibet mengklaim bahwa Tibet adalah bangsa yang terpisah dengan budaya yang berbeda dengan Cina, namun Cina menyatakan bahwa Tibet adalah minoritas bangsa Cina.

Tidak ada populasi yang mayoritas pada etnik Cina yang menetap di wilayah dari Kumbum ke Chamdo hingga Ladakh. Dalam sejarah bangsa Tibet tidak ada perkampungan khusus bagi etnis Cina. Di Tibet pada setiap kota tidak jelas berapa populasi Cina menetap. Hal ini tentu saja berubah sejak 1959, sekarang ada 7,5 juta pemukim Cina di Tibet, tidak termasuk tentara. Mereka dianggap penjajah, masyarakat tidak menganggap etnis cina menjadi jangkar budaya di Tibet.

Tibet sangat berbeda dari Cina, istilah Tibet digunakan untuk etnis Tibeto-Burman beberapa ahli bahasa mengambil istilah " Sino-Tibet " untuk memasukkan etnis cina di Tibet, dengan membentuk dua subfamilies berbeda. Tibet menggunakan beberapa istilah-istilah dari Cina, tetapi juga menggunakan

kata-kata India, Nepal dan Mongol. Setelah 30 tahun penjajahan, hanya beberapa penduduk Tibet yang dapat berbahasa Cina. Walaupun generasi muda Tibet telah mengikuti perkembangan zaman, tetapi mereka telah dipaksa untuk selalu menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-undang yang pertama di Tibet diumumkan secara resmi oleh Kaisar Srong Gampo di abad ke 7, yang merujuk kepada hukum moral Budha di India, dengan tidak ada kaitannya dengan Confusius dari tradisi Cina.

Cina dianggap sebagai musuh utama leluhur Tibet sepanjang sejarah. Di sisi lain Orang Cina dianggap sebagai orang Tibet keturunan barbarians yaitu orang yang kurang beradab, bengis dan kejam. Pembangunan Tembok Besar Cina dibangun adalah untuk mengantisipasi serangan suku-suku yang dianggap berbahaya dan serius yang ingin melakukan perlawanan kepada etnis Han. Kekaisaran Tibet adalah musuh dari Dinasti T'ang, sebagaimana dibuktikan dalam perang dan perjanjian antara dua Kekaisaran. Tentara Tibet menaklukkan T'ang di Ch'ang-an (Changan) pada abad ke-8. Hubungan baik dengan orang Tibet dianggap penting oleh Penguasa Mongol, seperti Kublai Khan, dan dinasti Manchu, terutama K'ang-HSI (Kangxi) dan Ch'ien Lung (Qianlong), yang dianggap sebagai orang Tibet. Jadi dalam hal sejarah, dapat dimengerti bahwa orang Tibet merasa diperlakukan menjadi bangsa jajahan di bawah dominasi Cina, sehingga menimbulkan kebencian yang paling dalam kepada leluhur bangsa Han. Cina yang datang sebagai penjajah juga merasa dirinya harus menguasai wilayah atau sebagai tuan di Tibet yaitu antara mempertahankan atau

melawan, sehingga Cina itu cenderung memperlakukan bangsa Tibet dengan kekerasan.

2. Masyarakat dan Budaya Tibet setelah Masuknya Cina

Setelah masuknya Cina ke wilayah Tibet, perubahan sangat dirasakan oleh penduduk asli Tibet. Kebudayaan Tibet yang memang berbeda dengan bangsa Cina perlahan dikekang sehingga hanya kebudayaan Cina yang boleh berkembang. Karena perbedaan prinsip kebudayaan dan kebebasan masyarakat Tibet inilah yang bisa mengakibatkan konflik dalam skala kecil dan terus berkembang menjadi besar.

Cina tidak memberikan ruang dan kebebasan terhadap bangsa Tibet dalam berekspresi. Jelas-jelas Cina mencoba menutup rapat masuknya bangsa lainnya untuk melakukan hubungan dengan Tibet. Politik isolasi atau politik Pintu tertutup dilakukan Cina terhadap Tibet agar bangsa Tibet tetap dalam penguasaannya. Politik pintu tertutup yang dilakukan Cina jelas-jelas ditentang oleh bangsa Tibet karena dianggap melanggar hak-hak sipil bangsa Tibet.

a. Larangan Cina Terhadap Kebebasan Beragama di Tibet

Bersamaan dengan pengaruh orang-orang Mongolia yang semakin kuat di Tibet, terjalin sebuah hubungan pendukung antara penguasa Mongol dan para Lama Sakya (pimpinan agama Budha Tibet). Konsekuensinya, pada tahun 1253, Kublai Lhan mempersembahkan tiga provinsi Tibet kepada Lama Sakya bernama Drogon Chogyal Phagpa. Para penerus dari Lama ini memerintah Tibet selama

150 tahun. Pada tahun 1358 mereka kehilangan kekuasaan di tangan Tai Situ Jangchub Gyeltsen. Pemerintahan selanjutnya di bawah silsilah Phagmotrupa berlangsung hingga 1435, diikuti dengan raja-raja Rinpung yang memerintah selama 4 generasi dari 1435 sampai 1565 dan juga tiga raja Tsangpa 1566-1641.

Pada peralihan abad ke 16, kekuasaan dan pengaruh kaum Gelugpa telah berkembang dengan pesat. Dalai Lama ketiga, Sonam Gyatso (1543-1588), memperkuat prospek politik Tibet. Hal ini adalah hasil dari kunjungan beliau ke Mongolia pada tahun 1578 atas undangan Altan Khan dari Tumet Mongol, yang juga memberikan beliau gelar 'Dalai Lama' atau "Samudera Kebijaksanaan". Dalai Lama keempat lahir dalam keluarga Mongolian, namun dibawa kembali ke Tibet untuk diberikan pendidikan. Pada tahun 1642, Gushri Khan memberikan kekuasaan spiritual maupun politik Tibet kepada Dalai Lama ke Lima yang Agung, Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682).

Masuknya Cina sedikit banyak telah membawa perubahan kebebasan beragama di Tibet. Bangsa Tibet yang sebagian besar beragama Budha selalu diprovokasi untuk tidak menjalankan ibadah. Cina sendiri berkeinginan mengembangkan ajaran Konfusianisme pada bangsa Tibet. Kebebasan beragama yang merupakan hak asasi jelas-jelas dilanggar oleh Cina. Karena kebebasan beragama di Tibet dilarang oleh militer Cina, maka banyak terjadinya perlawanan oleh para rahib dan Bikhsu Budha terhadap Cina. Dalai Lama sebagai pimpinan spiritual bangsa Tibet selalu menentang kebijakan yang diterapkan Cina, yang

akhirnya Dalai Lama selalu di kejar dan hendak ditangkap oleh penguasa Cina di Tibet.

Dalai Lama ke 5 mendirikan Pemerintahan Ganden Phodrang, yang hingga hari ini masih berlangsung di bawah kepemimpinan Dalai Lama ke 14. Pada tahun 1959, karena Agresi Cina ke Tibet, Dalai Lama mencari perlindungan (*asylum*) ke India. Dalai Lama kemudian mendirikan pemerintahan di pengasingan untuk mengurus masalah pendidikan, kebudayaan, tempat tinggal, vihara, dan politik Tibet. cara ini adalah langkah yang signifikan dalam mempertahankan kebudayaan Tibet dan Buddhisme Tibet. Council for Religious and Cultural Affairs bertanggung jawab untuk mendukung aktifitas religius dan budaya Tibet dan juga kesejahteraan komunitas vihara (Sangha).¹⁸

Sebelum Cina masuk ke Tibet, terdapat lebih dari 6000 vihara di tiga daerah di Tibet, U-Tsang, Doto, dan Domey. Dari semua ini, hampir tidak ada yang tersisa, dan sebagian besar benar-benar dihancurkan oleh pasukan Cina. Di pengasingan, lebih dari 200 vihara (termasuk untuk para bhikshuni) telah dibangun kembali, yaitu di India, Nepal, dan juga Bhutan. Saat ini terdapat lebih dari 600 pusat Dharma Buddhisme Tibet di berbagai negara.

¹⁸ Sumber: www.tibet.com/Dharma Manggala, Buletin Maya Indonesia. Diakses 4 Agustus 2009

B. Keberadaan Cina Di Tibet

1. Kronologi Kebijakan Cina di Tibet

Dalam perjanjian hukum internasional yang mengikat negara Tibet yang ditandatangani oleh pemimpin Tibet pada waktu tersebut, sebenarnya tidak ada yang dipaksakan dengan kekerasan atau suatu negara yang memaksa untuk menandatangani perjanjian dengan ancaman kekerasan. Hal ini tercermin dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perang (Hukum Humaniter) yang dianggap sebagai cerminan hukum internasional.

RRC yang tidak mematuhi perjanjian dan kesepakatan yang sudah ditandatangani tersebut akhirnya membuat konflik antara Cina dan Tibet.

Setelah invasi militer RRC ke wilayah Tibet, tentara Tibet mulai melakukan perlawanan namun pada akhirnya dapat dikalahkan. Tibet dalam perjanjian tersebut telah dinyatakan sebagai bagian dari Cina, walaupun sudah menikmati banyak otonomi. Dalam White Paper, Cina telah mengklaim bahwa wilayah Tibet telah dimasukkan ke dalam perjanjian secara sukarela oleh Pemerintah Tibet. Dalai Lama sendiri, dalam perjanjian tersebut telah menyatakannya dalam perjanjian antara Tibet dengan RRC.

Fakta menunjukkan cerita yang sangat berbeda, yang mengarah kepada kesimpulan bahwa yang disebut 17 Point dalam Perjanjian "*Damai Liberation of Tibet*" tidak pernah valid dan ditolak oleh Tibet. Dalai Lama memberikan informasi kepada Perdana Menteri Tibet Lukhangwa untuk memberikan ultimatum kepada Cina agar mentaati persyaratan Perjanjian Seventeen-Point

tersebut. Tibet sendiri tidak menerima kesepakatan tersebut, karena Cina sendiri telah berulang kali melanggar persyaratan dan kesepakatan itu.¹⁹

2. Perundingan Cina dan Tibet

Setelah kemenangan Tibet terhadap kelompok Komunis RRC pada tanggal 1 Oktober 1949, Radio Beijing mulai mengumumkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina harus membebaskan semua wilayah Cina, termasuk Tibet, Xinjiang, Hainan dan Taiwan. RRC sendiri menanggapi ancaman ini, sebagai bagian dari pemberontakan dan perlawanan. Tibet berpendapat sengketa perbatasan dengan Cina merupakan alasan yang dibuat-buat. Menteri Luar negeri Tibet, pada tanggal 2 November 1949, menulis ke Mao Zedong mengajukan negosiasi untuk menyelesaikan semua sengketa teritorial. Salinan surat ini telah dikirim ke Pemerintah India, Inggris dan Amerika Serikat. Cina menyarankan kepada pemerintah Tibet untuk mengadakan negosiasi dengan pemerintah Cina sebagai tindakan preventif yang mungkin saja akan memprovokasi militer Cina untuk menolak usulan damai tersebut.

Pemerintah Tibet memutuskan untuk mengirim dua pejabat senior, Tsepon Shakabpa dan Tsechag Thubten Gyalpo, untuk bernegosiasi dengan perwakilan dari RRC dengan ketiga negara tersebut. Usulan tersebut intinya harus dilangsungkan di luar Cina ataupun Tibet. Para pejabat Cina kemudian mengambil langkah dan melaporkan ke Ketua partai komunis Cina yaitu Mao

¹⁹ Tanah dan Teman Saya, Dalai Lama, New York, Edisi Keempat, 1992, hal .95

Zedong. Ze Dong mengancam radio Cina bila masih membuat pengumuman tentang "kemerdekaan Tibet", mereka tidak akan mendapatkan keamanan dan jaminan. Cina menyatakan tidak akan mengganggu integritas teritorial Tibet untuk tidak akan melanggar dan menyatakan bahwa Tibet juga harus mentaati perjanjian dengan tidak akan mentolerir segala bentuk gangguan terhadap militer Cina terutama di wilayah perbatasan.

Dalam negosiasi dengan Duta Besar Cina, Yuan Zhong-Xian, delegasi Tibet menuntut Cina untuk menerima dua proposal yang diajukan Tibet yakni i) Dalam pertahanan nasional Tibet, tidak ditangani oleh Cina, dan ii) Tibet harus diakui sebagai bagian dari Cina dan memiliki otonomi khusus. Mereka kemudian melanjutkan kesepakatan tersebut di Cina untuk melanjutkan dan mengkonfirmasi dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Namun dari hasil kesepakatan yang dilangsungkan di Cina, Pemerintah Tibet diinstruksikan untuk menolak usulan Cina. Karena tidak mencapai kata sepakat dan hasil perundingan tidak memuaskan kedua belah pihak, akhirnya perundingan tersebut dihentikan.

Pemerintah Tibet akhirnya mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 7 November 1950, untuk tidak lagi mengintervensi permasalahan Tibet dengan Cina. Dalam surat tersebut isinya mengatakan bahwa, Tibet tidak dalam posisi untuk menolak orang Cina, justru Tibet telah menyepakati untuk melakukan negosiasi mengenai persyaratan yang telah diajukan Pemerintah Cina. Tibet sendiri

sebenarnya memahami, bahwa PBB memutuskan untuk menghentikan agresi di manapun itu terjadi.

Pada tanggal 17 November 1950, PBB resmi menyatakan bahwa agresi terhadap Tibet akan dibahas pada agenda konferensi PBB. Namun persoalan itu tidak dibahas dalam Majelis Umum PBB. Atas saran dari delegasi India, India menegaskan bahwa damai yang saling menguntungkan harus tercipta di Tibet. Tibet dan Cina akhirnya dapat mencapai kata sepakat terhadap agenda PBB tersebut.

Pada bulan April 1951, Pemerintah Tibet mengirimkan lima anggota delegasi ke Beijing, yang dipimpin oleh Kalon Ngapo Ngawang Jigme. Pemerintah Tibet mengirim delegasi untuk berunding dan untuk mendengarkan usulan Cina. Di bawah tekanan Cina, delegasi Tibet akhirnya menandatangani Perjanjian yang dilakukan oleh delegasi Tibet. Delegasi Tibet memperingatkan Cina agar tidak hanya menandatangani dalam kapasitas pribadi mereka karena Cina tidak memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian tersebut.

Tidak ada kendala yang berarti bagi Pemerintah Cina untuk melanjutkan dan menandatangani kesepakatan, dan mengumumkan kepada dunia bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan damai menuju kepada kemerdekaan Tibet. Delegasi menandatangani perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Cina untuk memberikan salinan kepada Pemerintah Tibet. Dalam isi perjanjian tersebut berisi antara lain, Cina diizinkan masuk ke Tibet dari wilayah Cina, penguasa / pemerintah Cina hanya menangani urusan eksternal.

Di sisi lain, Tibet menjamin bahwa Cina tidak akan mengubah sistem politik yang ada di Tibet dan tidak mengganggu status, fungsi, dan kekuasaan Dalai Lama atau Panchen Lama. Reformasi internal di Tibet akan dilakukan setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Tibet dan tanpa paksaan.

Mereka menandatangani Perjanjian tanpa konsultasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan petunjuk. Delegasi diminta untuk mengirim dokumen yang telah mereka tandatangani, dan tetap berada di Beijing untuk petunjuk lebih lanjut. Sementara itu, sebuah pesan singkat yang diterima dari delegasi mengatakan bahwa wakil Pemerintah Cina, General Zhang Jin-wu, diperintahkan untuk kembali, beberapa anggota delegasi itu kembali, melalui India, dan pemimpin delegasi itu langsung kembali ke Lhasa.²⁰

Dalam kesepakatan damai 17-Point bagi perdamaian dan pembebasan Tibet, terdapat dua faktor yang sangat penting. Pertama, sejauh mana Cina telah melanggar hukum internasional ketika PLA menjalankan tugas di Tibet, dan kedua, efek dari Perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian ini didasarkan pada prinsip universal dan diakui bahwa kewajiban harus terbebas dari tekanan pihak-pihak manapun, dan sebaliknya, bahwa kebebasan sangat penting untuk mewujudkan kesepakatan. Cina dengan kekuatan yang besar mengancam Tibet, dengan Cina dalam White Paper, Dalai Lama dan Pemerintah Tibet tidak bertindak secara sukarela menandatangani "Perjanjian" tersebut. Mao Zedong sendiri, dalam Petunjuk Pusat Komite Kebijakan BPK memerintahkan untuk

²⁰ Ibid

melaksanakan kesepakatan dengan Tibet²¹, yang dikeluarkan pada tanggal 6 April 1952.

3. Tibet Sebagai Provinsi Otonomi Cina

Tibet adalah provinsi dari Republik Rakyat Cina, yang merupakan Daerah Otonomi Khusus RRC yang juga diberi nama oleh Cina Xizang, yang berada di pegunungan Himalaya yang sering dikatakan sebagai puncak dunia, berbatasan dengan Nepal, Bhutan dan India serta Xinjiang, Qinghai dan Sichuan di Cina. Mayoritas penduduknya adalah beragama Buddha, dengan Lhasa sebagai ibu kotanya. Bertahun tahun yang lalu, sebelum dibuka oleh Cina, Tibet merupakan daerah yang dikatakan menyimpan misteri bagi para petualang, mengingat pada saat itu tidak semua orang dapat memasuki wilayah tersebut karena merupakan wilayah tertutup.

Tibet dahulu adalah sebuah kerajaan merdeka yang mengalami interaksi maupun benturan terutama secara politik dengan dinasti-dinasti yang ada di dataran Cina. Raja Tibet diberi gelar Dalai Lama dimana Dalai Lama yang sekarang, Tenzin Gyatso adalah Dalai Lama ke-14. Dalai Lama adalah pemimpin negara Tibet dan sekaligus pemimpin keagamaan.

Tibet menjadi provinsi Cina setelah serbuan tentara merah Cina pada tahun 1950 ke wilayah ini, pada musim gugur 1951²² pasukan Cina berhasil

²¹ Pilihan Bekerja dari Mao Tsetung, Vol. 5, Bahasa Asing Tekan, Beijing, 1977, hal.75.

²² Fransisca Ria Susanti Monday, March 31, 2008 Menimbang Otonomi Tibet

menguasai ibu kota Lhasa dan menurunkan Dalai Lama dari kekuasaannya. Dalainya, Dalai Lama menolak kesepakatan kerjasama bertajuk "Rencana Pembebasan Damai Tibet" yang teorinya nampaknya menguntungkan Tibet, namun prakteknya Cina melakukan penindasan dan pembantaian terhadap kepala suku dan sejumlah pendeta ("Lama") yang dianggap menentang, alasan lain Cina adalah "menghapus praktek penindasan bergaya feodalisme" di Tibet. Namun menurut beberapa analis internasional, Cina mengincar kandungan mineral yang terkandung didalam bumi Tibet. Pada tanggal 17 Maret 1959, Dalai Lama berhasil meloloskan diri dari kejaran tentara Cina ke India, usaha pelarian ini difasilitasi oleh Gampo Tashi, dan membangun pemerintahan pelarian di Dharamsala, India utara sampai sekarang.

Rakyat dan pemuka Tibet sempat melakukan perlawanan terhadap pendudukan Cina yang menimbulkan banyak korban jiwa khususnya dari pihak Tibet. Namun karena tidak seimbangny kekuatan persenjataan dan tidak adanya sorotan internasional, perlawanan Tibet, khususnya pada dasawarsa 1970-an berhasil dipadamkan.

Masalah Tibet menjadi ganjalan dalam hubungan internasional Cina dengan dunia internasional khususnya pada dekade 1960-1970-an, terutama hubungannya dengan Amerika Serikat. Namun setelah kunjungan presiden AS, Richard Nixon ke Cina yang mengawali kontak diplomatik AS-Cina, masalah

Tibet dianggap terlupakan atau selesai sampai sekarang. Terutama setelah pemimpin kedua Tibet, Panchen Lama, menyatakan bergabung dengan Beijing pada awal dekade tahun 2000.

Setelah kemenangan Ma Ying-jeou di Taiwan, satu-satunya pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan China hanyalah soal Tibet. Namun, sikap seperti apa yang bakal diambil Cina, sepenuhnya tergantung sejauh mana perundingan yang bakal dilakukan. Sikap manis yang diperlihatkan Cina terhadap Hong Kong dan Makau, juga kepada Taiwan, tidak akan berlaku untuk Tibet.

Dalam pidato peringatan pemberontakan Tibet yang gagal, 10 Maret 2006, pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama menyebut soal "*high-level autonomy*" sebagai solusi Cina untuk Tibet. Namun tuntutan ini rasanya sulit dipenuhi mengingat Cina merasa telah memberikan otonomi untuk kawasan tersebut. Tahun 2004, Cina bahkan mengeluarkan dokumen khusus "*Regional Ethnic Autonomy in Tibet*" terkait otonomi ini. Tapi otonomi tersebut, di mata Dalai Lama, tak dianggap riil otonomi. Konsep riil otonomi pernah disebut-sebut Dalai Lama dalam proposal damai yang ia bacakan di publik Amerika Serikat pada tahun 1987.

Intinya, menurut Dalai Lama, warga Tibet membutuhkan otonomi riil, menurut prinsip "satu negara dua sistem" di bawah kerangka Konstitusi Cina, dalam cakupan yang lebih besar dibanding Hong Kong maupun Makau. Namun, Dalai Lama melupakan bahwa ide "satu negara, dua sistem" ini muncul dari Deng Xiaoping yang jelas-jelas menggunakan prinsip tersebut agar bisa

menjalankan ekonomi kapitalisme, tanpa perlu mengubah garis sosialisme yang dianut Cina. Hal ini membuat negara di bawah kendali partai komunis, tetap bisa melakukan kontrol terhadap efek samping liberalisme pasar.

Sebuah analisis yang dikemukakan penulis asal Tibet, Yedor, pada pertengahan tahun 2006, menarik dicermati. Menurut Yedor, Beijing tak mungkin memberikan keistimewaan kepada Tibet, seperti Hong Kong dan Makau, karena kapitalisme tak pernah eksis di Tibet. Kepemimpinan Dalai Lama, yang dalam praktiknya tak hanya sekedar sebagai pimpinan agama tetapi juga politisi, menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih menyisakan warisan feodalisme yang kental. Dalam situasi seperti inilah, Cina tak mau sembarangan memberikan perluasan otonomi kepada Tibet.

Dalam dokumen "*Regional Ethnic Autonomy in Tibet*", disebutkan bahwa kondisi Tibet berbeda dengan Hong Kong dan Makau. Untuk itu, tidak akan ada perubahan sistem sosial atau politik apa pun di Tibet. Segala upaya untuk menghancurkan dan mengubah sistem politik yang saat ini berlaku di Tibet, menurut dokumen tersebut, sama artinya dengan melawan hukum dan perundangan Cina.

Di tengah situasi inilah, kerusuhan meledak di Tibet, dan Beijing tanpa menunggu waktu segera menunjuk Dalai Lama sebagai dalang kerusuhan. Beijing tak bisa lagi menahan geram. Upaya mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Tibet, termasuk dengan membangun jalur kereta api

hingga Lhasa guna membuka jalur perdagangan Tibet dengan kawasan lain di Cina ini, diganggu dengan kerusuhan yang mengusung isu identitas etnis.

Bantahan Dalai Lama terhadap tudingan ini tak membuat Cina bergeming. Di mata Beijing, Dalai Lama tak serius mencari solusi damai bagi Tibet di bawah kerangka Konstitusi Cina. Pernyataan-pernyataan Dalai Lama di komunitas internasional maupun dari tempat pengasingannya di Dharamsala, India, dinilai masih menyembunyikan motifnya untuk memisahkan Tibet dari Cina. Beijing juga meyakini bahwa Dalai Lama dan pendukungnya ingin menggunakan momentum Olimpiade 2008 untuk melakukan "internasionalisasi" isu Tibet dan menggalang dukungan bagi kemerdekaan Tibet.²³

Dalai Lama telah membantah tudingan ini dan menganggap Beijing mengada-ada. Namun, walaupun kelompok pembebasan Tibet berada di balik kerusuhan ini, agaknya dukungan dari internasional juga sulit dicapai. Sikap terbuka Cina terhadap investasi asing, pasar yang besar, tenaga kerja yang murah, membuat sikap memusuhi Cina tak akan membawa keuntungan apa-apa bagi negara-negara penganut keyakinan pasar bebas.

Cina agaknya tahu persis hal ini. Meski di sisi lain, Cina juga sadar bahwa pertumbuhan ekonomi yang mereka capai selama lima tahun terakhir dan ekspansi pasar mereka di seluruh dunia, mulai membuat gerah negara lain. Namun, Cina sebaiknya tidak mengabaikan permasalahan dari dalam. Jika Cina

²³ Dimuat di Sinar Harapan, 27 Maret 2008

tidak pandai menjaga jarak dan kesenjangan atau jurang kaya-miskin di dalam negeri, seiring laju pertumbuhan ekonominya, maka batu kerikil seperti Tibet bisa saja menjadi batu sandungan karena akan memicu permasalahan yang sama di tempat-tempat lain. Dalam hal ini, isu etnis hanya akan menjadi sebuah bom waktu yang dapat meledak setiap saat.